



## Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Yovita Tamo Ina<sup>1\*</sup>, Adrianus Kabubu Hudang<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, (Waingapu), Indonesia

\*Corresponding author email: [yovitatomoina99@gmail.com](mailto:yovitatomoina99@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received March 01, 2024

Approved May 05, 2024

#### Keywords:

East Nusa Tenggara Province, General Allocation Funds, Human Development Index, Revenue Sharing Funds, Special Allocation Funds

#### ABSTRACT

*Improving the Human Development Index (HDI) is not directly aimed at boosting the economy, but rather at improving the overall quality of human life. This study aims to analyse the effect of Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) on the HDI in East Nusa Tenggara (NTT). This study uses a descriptive statistical analysis method with the help of the EViews 10 analysis tool. The study found that partially, the DBH and DAK variables have a positive effect on the HDI. This means that an increase in these variables will increase the HDI. Meanwhile, DAU has a negative influence. This means that each increase in DAU will actually lower the HDI in NTT. Furthermore, simultaneously, the DBH, DAU, and DAK variables have a significant effect on the HDI in NTT.*

#### ABSTRAK

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian secara langsung, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap IPM di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan bantuan alat analisis Eviews 10. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial variabel DBH dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa peningkatan variabel tersebut akan meningkatkan IPM. Sementara DAU memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan DAU justru akan menurunkan IPM di NTT. Selanjutnya secara simultan variabel DBH, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM di NTT.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.55681/jigs.v5i2.2718>

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia kini memasuki era baru dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai aturan perundang-undangan (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah. Di satu sisi, otonomi daerah memberikan keuntungan, namun di sisi lain juga menjadi beban. Seiring berjalannya waktu, daerah perlu meningkatkan kesiapannya untuk dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Ketimpangan pembangunan dan hambatan dalam pengembangan daerah mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah, di mana pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri sesuai aspirasi masyarakat (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Berdasarkan prinsip desentralisasi, pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari APBD, yang digunakan untuk operasional, belanja modal, dan keperluan tak terduga. Penggunaan dana tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Prioritas diberikan pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan fasilitas sosial dan umum yang memadai. Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja modal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin positif dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Patadang et al., 2021).

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Widia Sofyan (2023) IPM adalah sebuah indikator komprehensif yang mencerminkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, dengan cakupan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia menggunakan tiga indikator utama untuk mengevaluasi suatu negara. *Pertama*, Umur panjang diukur dengan rata-rata harapan hidup penduduk. *Kedua*, Pendidikan diukur dengan rata-rata tertimbang kemampuan membaca dan menulis orang dewasa, serta rata-rata lama sekolah. *Ketiga*, Standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan dengan daya beli masing-masing negara (*Purchasing Power Parity*). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pembangunan di aspek lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, akan menghasilkan peningkatan IPM yang kurang ideal. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan di berbagai aspek sangatlah penting untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan manfaat dari peningkatan tersebut.

Menurut Patadang et al (2021) upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tujuan yang spesifik dan tidak mencakup semua aspek kehidupan. Peningkatan IPM bukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian secara langsung, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga aspek utama yaitu Pendidikan, Kualitas Hidup, dan Kesehatan. Peningkatan IPM menjadi landasan pembangunan di setiap provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Marwati (2016) menyampaikan bahwa NTT termasuk provinsi dengan IPM terendah ketiga di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Rata-rata kenaikan IPM NTT per tahun adalah sekitar 0,38 persen, dan mencapai nilai 65,9

persen pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tertinggal jauh dibandingkan dengan IPM Nasional. Pada tahun 2022, IPM NTT hanya mencapai 65,9 persen, sedangkan IPM Nasional mencapai 72,91 persen (BPS, 2023).

Baik di tingkat provinsi maupun nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan, meskipun masih dalam kategori sedang. Menurut Juliarini Aniek (2020) salah satu faktor yang mendorong peningkatan IPM adalah dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa DBH, DAU, dan DAK sebagai instrumen fiskal pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori ini menekankan peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik, pendidikan, dan layanan kesehatan yang penting bagi pembangunan manusia (Widani and Erawati 2016).

Menurut Patadang et al (2021) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan daerah untuk membiayai belanja daerah secara memadai, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana tersebut merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi dengan tren meningkat secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Terlihat pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,11 dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,08 dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan sebesar 0,60. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 0,04. Meskipun mengalami fluktuasi, DBH NTT menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa NTT mendapatkan manfaat dari sumber daya alamnya. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami fluktuasi dengan tren menurun khususnya pada 3 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2019 DAU NTT mengalami peningkatan sebesar 4,67% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yakni sebesar -8,74 persen dari tahun sebelumnya, penurunan terus terjadi hingga tahun 2022 dengan persentase sebesar 0,07 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sama seperti DBH dan DAU, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi NTT juga menunjukkan fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2022. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi dalam penyaluran dana ke Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2018-2022.

Menurut Widia Sofyan (2023) menemukan bahwa DAU, DAK, dan DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Artinya, peningkatan DAU, DAK, dan DAK akan meningkatkan IPM, demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1999) yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya guna mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM di suatu wilayah, sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam suatu wilayah.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Williantara & Budiasih, 2016) yang menunjukkan bahwa variabel DBH, DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, maka peneliti ingin mengkaji ulang terkait “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2018-2022.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode analisis eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh alokasi DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di Provinsi NTT. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT. Analisis statistik dilakukan melalui analisis regresi data panel, dimana proses analisis dimulai dengan pemilihan model estimasi terbaik diantara *Common Effect Models* (CEM), *Fixed Effect Models* (FEM), dan *Random Effect Models* (REM). Setelah model ditentukan, dilakukan pengujian Hipotesis yang terdiri dari Uji Parsial (t), Uji Simultan (F), dan Uji Kointegrasi ( $R^2$ ) dan dilakukan interpretasi estimasi regresi linear berganda. Proses analisis dilakukan menggunakan bantuan alat analisis *Eviews* 10. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel yakni data sejak tahun 2018-2023 (*time series*) dan data 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT (*cross section*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dalam rentang waktu 2018-2022. Pada tahun 2018, IPM NTT sebesar 64,39 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 65,23 persen, hingga terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar 65,90 persen. Meskipun mengalami peningkatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tertinggal jauh dibandingkan dengan IPM Nasional. Salah satu upaya dalam meningkatkan IPM yakni melalui pemanfaatan transfer dana dari pusat yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK.

### **Hasil**

#### **Pengujian model estimasi**

Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan data panel yang merupakan kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* dengan menggunakan perangkat lunak *Eviews* 8 untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2018-2022 melalui analisis regresi linear panel. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yang tepat, yaitu CEM, FEM, dan REM. Keputusan dalam menentukan jenis model yang akan digunakan dalam analisis data panel didasarkan pada dua uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Sementara itu, uji Hausman digunakan untuk memutuskan apakah model yang akan digunakan adalah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* (Basuki Tri & Prawoto, 2016). Pengujian model akan dilakukan melalui uji Chow dan Uji Hausman.

## Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk memilih model terbaik antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) untuk melakukan estimasi data panel dengan membandingkan efektivitas keduanya. Dalam penelitian ini, Chow test dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews. Tujuannya adalah untuk menentukan pendekatan mana yang paling cocok antara Common Effect dan Fixed Effect dalam analisis regresi data panel, dengan keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas cross-section F.

1. Jika nilai probability cross section  $F > 0,05$ , maka model yang dipilih adalah pendekatan common effect.
2. Jika nilai probability cross section  $F < 0,05$ , maka model yang dipilih adalah pendekatan fixed effect.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	173.582549	(21,85)	0.0000
Cross-section Chi-square	415.973235	21	0.0000

Sumber: data diolah, Eview10

Hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-Section Chi-square* memiliki nilai sebesar 0,0000. Angka tersebut berada di bawah 0,05 sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji Chow yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

## Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas *cross section random*. Jika nilai probabilitas *cross-section random*  $< 0,05$ , maka model yang dipilih adalah pendekatan *fixed effect*. Selanjutnya apabila nilai probabilitas *cross-section random*  $> 0,05$  maka model yang dipilih adalah pendekatan *random effect* dengan keputusan berdasarkan nilai probabilitas *cross-section random*.

1. Jika nilai probabilitas *cross-section random*  $< 0,05$ , maka model yang dipilih adalah pendekatan efek tetap ( *fixed effect* ).
2. Jika nilai probabilitas *cross-section random*  $> 0,05$ , maka model yang dipilih adalah pendekatan efek acak ( *random effect* ).

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	66.520684	3	0.0000

Sumber: Data diolah, Eviews10

Hasil uji Hausman dalam Tabel 2 terlihat bahwa probabilitas *cross section random* lebih rendah sebesar 0,0000 lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa diantara model terbaik diantara FEM dan REM adalah FEM. Sehingga berdasarkan pengujian chow dan Hausman maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Models* (FEM).

### Uji Normalitas

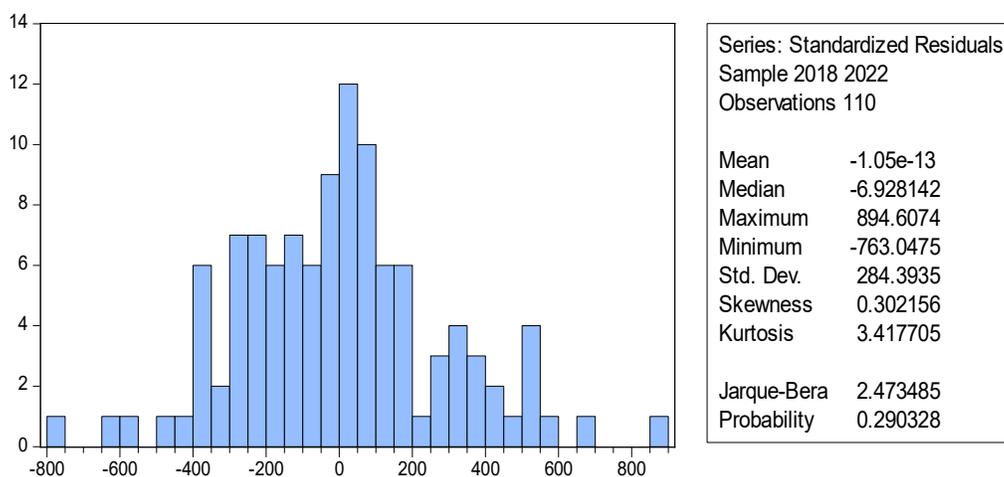
Uji normalitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan apakah data berasal dari populasi yang mengikuti distribusi normal atau memiliki karakteristik sebaran yang normal. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris, dengan modus, mean, dan median yang berada di tengah-tengah distribusi. Distribusi ini sering digambarkan sebagai lonceng jika dilihat dalam bentuk histogram. Untuk menilai apakah data mengikuti distribusi normal, digunakan koefisien Jarque-Bera serta probabilitasnya. Hal ini karena salah satu asumsi penting dalam analisis data panel adalah bahwa gangguan uji-t memiliki karakteristik distribusi probabilitas yang mengharapkan rata-rata nol, tidak ada korelasi, dan varian yang konstan. Dalam konteks pengujian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

H0: Data mengikuti distribusi normal

H1: Data tidak mengikuti distribusi normal

Aturan pengujian adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05), maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima; sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi (0,05), maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Berikut adalah gambar uji normalitas:

Tabel 3. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, Eviews10

Dari hasil pengujian normalitas pada Tabel 3, didapatkan nilai probabilitas adalah sebesar 0,290328 yang artinya nilai probabilitas 0,290328 > nilai signifikan (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah terdistribusi normal.

### Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan *Fixed Effect Model* diperoleh rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM = 6452,4434 + 85,0779 \cdot \text{LOG}(\text{DBH}) - 0,0067 \cdot \text{DAU} + 0,0054 \cdot \text{DAK} + e$$

1. Ketika Variabel DBH mengalami peningkatan sebesar satu (1) satuan, maka IPM akan mengalami peningkatan sebesar 85,0779.
2. Ketika variabel DAU mengalami peningkatan satu sebesar (1) satuan, maka IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,0067.

3. Ketika variabel DAK mengalami peningkatan satu (1) satuan, maka IPM akan mengalami peningkatan sebesar 0,0054.

### Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) dan Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F, uji koefisien determinasi (R-square), dan uji T.

### Uji F-Statistic

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakanlah Uji F dengan membandingkan F-statistik dengan nilai F-tabel. Apabila model tersebut signifikan, maka dapat digunakan untuk prediksi atau peramalan. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk peramalan. Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas (F-statistic). Jika nilai probabilitas (F-statistic) lebih kecil dari nilai signifikansi pada level 5% maka dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F yang di peroleh:

Tabel 4. Uji F-Statistic

F-statistic	332.8496
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, Eviews 10

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000000 lebih rendah dari nilai signifikansi 5 persen ( $0,0000 < 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yakni DBH, DAU dan DAK secara simultan mempengaruhi IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai *Adjusted R-Squared* yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

<b>R-squared</b>	0.989472
<b>Adjusted R-squared</b>	0.986499

Sumber: Data diolah, Eviews 10

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.986499. Nilai determinasi koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK mampu menjelaskan variabel IPM sebesar 98,65 persen, sedangkan sisanya yakni 1,35 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Uji Parsial (T)

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dan seberapa besar pengaruhnya secara parsial, dengan membandingkan nilai probabilitas masing-masing variabel. Jika nilai probabilitas masing-masing variabel  $< 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Sebaliknya jika nilai probabilitas masing-masing variabel  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Tabel 6. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6452.443	196.4357	32.84761	0.0000
LOG (DBH)	85.07792	27.24258	3.122976	0.0024
DAU	-0.006706	0.002966	-2.260876	0.0263
DAK	0.005420	0.001344	4.031314	0.0001

Sumber: Data diolah, Eviews10

Berdasarkan uji parsial pada tabel 6 diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel DBH diperoleh nilai probabilitas  $0,0024 < 0,05$  dan juga memiliki nilai t-Statistic yang bernilai positif. Maka dapat diartikan bahwa variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Hasil uji t pada variabel DAU diperoleh nilai probabilitas  $0,0263 < 0,05$  dan juga memiliki nilai t-Statistic yang bernilai negatif. Maka dapat diartikan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Hasil uji t pada variabel DAK diperoleh nilai probabilitas  $0,0001 < 0,05$  dan juga memiliki nilai t-Statistic yang bernilai positif. Maka dapat diartikan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Pembahasan

#### Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini bermakna bahwa peningkatan alokasi DBH mengakibatkan terjadinya peningkatan IPM, begitupun sebaliknya. Hasil ini semakin mempertegas amanat Undang-Undang No 32 (2004), bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan karena keberadaan DBH dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor-sektor yang dapat mendukung peningkatan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Melalui keberadaan DBH ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dengan menyediakan berbagai fasilitas dan gedung sekolah yang lebih baik dan merata di daerah-daerah pelosok. Selain itu juga pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, dan keluarga miskin serta memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan keterampilan mereka. Sehingga dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan ini, selanjutnya

akan meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Literasi, yang merupakan komponen penting dalam menghitung IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (De Fretes, 2017) bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kepulauan Yapen.

### **Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil analisis diatas dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti bahwa kenaikan DAU dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam penelitian ini, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa peningkatan DAU sejalan dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum juga bersifat block grants, yaitu penggunaan dari sumber dana itu ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan prioritas daerah dan tidak ada intervensi dari pemerintah pusat. Dengan sifat tersebut, pengelolaan dana bagi hasil bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh daerah untuk pembangunan daerahnya. Pemerintah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah. Seharusnya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih, dengan kata lain semakin tinggi dana alokasi umum maka akan semakin menaikkan angka indeks pembangunan manusia. meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM dapat disebabkan karena karena alokasi DAU yang tidak tepat sasaran, dimana pemerintah daerah mengalokasikan DAU untuk kegiatan yang tidak esensial dan tidak berdampak langsung pada peningkatan IPM, seperti belanja pegawai dan perjalanan dinas. Kondisi demikian menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk sektor-sektor yang lebih penting untuk peningkatan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hasil ini turut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fadhly, 2018) bahwa variabel DAU pada daerah provinsi Sumatera Barat berpengaruh negatif terhadap IPM. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) pada daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu bahwa DAU justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dimana DAU dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil analisis diatas dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti bahwa dengan adanya peningkatan DAK maka akan menciptakan peningkatan IPM di provinsi NTT. Dana alokasi khusus merupakan dana yang penggunaannya sudah ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Oleh karena itu, peningkatan dana alokasi khusus

dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan adanya DAK ini menyebabkan pemerintah perlu menyediakan berbagai fasilitas atau infrastruktur baik jumlah maupun mutu berkaitan dengan fokus pembangunan nasional terutama masalah pendidikan yang masih rendah. Temuan ini didukung oleh penelitian (Riviando et al.,2019) bahwa DAK pada daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Namun terdapat hasil yang berbeda, penelitian oleh (Sulastrri & Efendri, 2019) menunjukkan bahwa variabel DAK justru berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh DBH, DAU dan DAK terhadap IPM di Provinsi NTT menunjukkan bahwa; DBH ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, setiap peningkatan DBH sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 85,08. Disisi lain, DAU ( $X_2$ ) berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM yang mana setiap peningkatan DAU sebanyak 1 (satuan) akan menurunkan IPM sebanyak 0,0067. Meskipun DAU bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam beberapa kasus, DAU dapat memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dapat terjadi karena alokasi DAU yang tidak tepat sasaran, pemerintah daerah mengalokasikan DAU untuk kegiatan yang tidak esensial dan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan IPM, seperti belanja pegawai dan perjalanan dinas. Hal ini menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk sektor-sektor yang lebih penting untuk peningkatan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya variabel DAK ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang mana peningkatan DAK sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 0,0054.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa saran terkait alokasi DBH, DAU dan DAK dalam peningkatan IPM di NTT, yakni perlu adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang terkait dengan pemanfaatan dana DBH, DAU dan DAK. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan selaras dengan tujuan nasional dan daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah perlu menyusun mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa dana DBH, DAU, dan DAK digunakan secara efektif untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan IPM. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi yang berkelanjutan, serta publikasi informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat. Dalam rangka mendalami hubungan antara DBH, DAU, DAK dan IPM di berbagai daerah maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga memperoleh temuan yang lebih kontekstual dan dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan dan program terkait khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023*. 53000.2307. ntt.bps.go.id
- De Fretes, P. N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 2(2), 1–33.

- Fadhly, Z. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Juliarini Aniek, H. A. W. (2020). Pengaruh otonomi Khusus terhadap indeks pembangunan manusia di TanaH Papua. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 335–1115.
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, DAK, Dan DBH Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 100–113. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/447>
- Marwati, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Tingkat Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2010-2014. In *Skripsi*. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53894%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53894/1/DITA MARWATI - FEB.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53894%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53894/1/DITA%20MARWATI%20-%20FEB.pdf)
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132–149.
- Riviando, A., Agustin, H., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Model sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Rizkiyah, J., & Anitasar, H. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6, 1–6.
- Sulastri, E., & Efendri. (2019). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019). *Keywords in Qualitative Methods*, 1–12. [http://info.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/AKT/b06ca-jurnal\\_evi-sulastri\\_17116021\\_final.pdf](http://info.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/AKT/b06ca-jurnal_evi-sulastri_17116021_final.pdf)
- Undang-Undang No 32, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Widia Sofyan, V. R. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 221–227. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.1090>
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070.
- Widani, Cok Istri Krisnanda, and Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 203-232.

